

# **Polri dan Identitas Sipil: Meneguhkan Karakter Pelayan, Pelindung, dan Pengayom**

**Tim CSP – Center for Strategic Policing**

## **Pendahuluan**

Sejak tahun 1999, ketika Polri resmi dipisahkan dari TNI dan meneguhkan dirinya sebagai institusi sipil, harapan besar publik melekat pada transformasi peran dan identitas kepolisian. Status baru ini menandai babak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, di mana Polri diamanatkan untuk menampilkan wajah humanis, profesional, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Perubahan tersebut bukan sekadar administratif, tetapi juga menyangkut reposisi identitas: dari bayang-bayang tradisi militeristik menuju karakter sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom rakyat.

Namun dalam praktik sehari-hari, warisan atribut dan kultur militer masih kerap tampak, baik dalam bentuk simbol-simbol seremonial maupun dalam pola pendekatan terhadap masyarakat. Pameran peralatan tempur dalam berbagai acara resmi, gaya komunikasi komando yang kaku, hingga penekanan pada hierarki kekuasaan menunjukkan bahwa transisi

identitas sipil belum sepenuhnya tuntas. Lebih jauh, sejumlah kasus serius yang melibatkan anggota Polri sendiri justru memperkuat persepsi publik akan masih kuatnya kultur kekerasan dalam tubuh kepolisian. Kasus *Ferdy Sambo* pada 2022, misalnya, di mana seorang perwira tinggi terlibat dalam rekayasa pembunuhan berencana terhadap ajudannya, menimbulkan guncangan besar dan memperlebar krisis kepercayaan publik. Kasus serupa juga muncul pada November 2024 di Solok Selatan, ketika terjadi peristiwa “polisi tembak polisi” di dalam Markas Polres setempat, yang menewaskan seorang anggota. Peristiwa internal semacam ini semakin menegaskan bahwa problem budaya kekerasan bukan hanya soal hubungan Polri dengan masyarakat, melainkan juga menyangkut relasi antarsesama anggota di institusi itu sendiri.

Di tengah tuntutan publik yang semakin kuat agar Polri tampil transparan, akuntabel, dan humanis, evaluasi terhadap atribut dan kultur yang masih mengandung nuansa militeristik menjadi kebutuhan mendesak. Peneguhan kembali identitas sipil bukan sekadar persoalan citra, melainkan menyangkut legitimasi Polri sebagai pilar utama dalam tata kelola keamanan masyarakat di negara demokrasi. Dengan demikian, refleksi terhadap simbol, budaya, dan orientasi kerja Polri hari ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa visi “pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat” benar-benar hadir dalam realitas.

## Kesan Militeristik dalam Setiap Pagelaran Polri

Salah satu wajah Polri yang paling sering terangkap mata publik adalah bagaimana institusi ini menampilkan diri dalam setiap pagelaran seremonial. Mulai dari HUT Bhayangkara, upacara resmi, hingga momen-momen penyambutan pejabat negara, Polri kerap menonjolkan peralatan taktis, formasi pasukan yang rapi ala militer, serta atraksi paramiliter oleh Brimob yang menekankan kekuatan fisik dan kedisiplinan komando. Walaupun pameran tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan kesiapan Polri dalam menjaga keamanan, kesan yang muncul di ruang publik justru lebih dekat dengan citra militer ketimbang wajah sipil yang humanis.

Di banyak kesempatan, simbol-simbol yang dipakai pun masih menyerupai milik TNI, baik dalam hal lambang, atribut seragam, maupun gaya komunikasi komando. Identitas visual ini memperkuat kesan bahwa Polri masih setengah jalan dalam memisahkan diri dari akar militernya. Padahal, dalam konteks negara demokrasi, simbol-simbol bukan hanya ornamen belaka, melainkan juga penanda identitas kelembagaan yang membentuk persepsi publik.

Orientasi pada kekuatan atau *show of force* juga kerap menjadi strategi utama dalam momentum publik. Misalnya, pengerahan pasukan besar dengan kendaraan taktis dan senjata lengkap dalam mengamankan demonstrasi atau agenda kenegaraan. Praktik semacam ini memang dapat menimbulkan efek gentar, namun sekaligus berpotensi menimbulkan

jarak psikologis antara Polri dan masyarakat yang seharusnya mereka layani. Polri kemudian dipandang lebih sebagai kekuatan represif ketimbang institusi sipil yang mengedepankan pelayanan dan perlindungan.

Kesan-kesan militeristik dalam pagelaran resmi ini bukan hanya masalah estetika seremonial, melainkan juga mencerminkan orientasi budaya organisasi yang masih menempatkan kekuatan bersenjata sebagai modal utama legitimasi. Jika tidak dievaluasi, kecenderungan ini bisa memperlambat upaya Polri untuk meneguhkan identitas sipil yang berakar pada prinsip demokrasi, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

## **Dampak pada Citra dan Legitimasi**

Kesan militeristik yang terus dipertahankan dalam berbagai pagelaran Polri membawa implikasi serius terhadap citra dan legitimasi institusi. Publik kerap melihat Polri bukan sebagai aparat sipil yang melekat dengan masyarakat, melainkan sebagai institusi “semi-militer” yang lebih menonjolkan kekuatan bersenjata. Citra ini menimbulkan jarak sosial dan psikologis antara polisi dan warga, sehingga rasa kedekatan, kepercayaan, dan kemitraan yang seharusnya menjadi modal utama kepolisian sipil menjadi terkikis.

Dalam konteks negara demokrasi, legitimasi Polri bertumpu pada kemampuannya menjalankan peran

sebagai pelayan publik. Polisi sipil seharusnya identik dengan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman, bukan dengan intimidasi atau penggunaan kekuatan yang berlebihan. Ketika masyarakat lebih sering menyaksikan atraksi pasukan bersenjata dan peralatan taktis dalam acara publik, pesan yang tersampaikan adalah bahwa kekuasaan Polri berasal dari kekuatan fisik, bukan dari kepercayaan masyarakat.

Kondisi ini berpotensi memicu *trust deficit* yang semakin dalam. Tanpa wajah sipil yang menonjol, Polri akan kesulitan membangun kedekatan emosional dengan warga, padahal legitimasi sosial lebih menentukan keberhasilan penegakan hukum ke-timbang sekadar instrumen kekuatan. Lebih jauh, jika ketidakpercayaan ini dibiarkan, maka Polri dapat terjebak dalam lingkaran setan: semakin represif dalam merespons kritik publik, semakin besar pula jarak dengan masyarakat.

Oleh karena itu, dampak dari kesan militeristik ini bukan sekadar soal simbol atau estetika kelembagaan, melainkan menyentuh fondasi legitimasi Polri dalam sistem demokrasi. Meneguhkan citra sipil adalah keharusan, bukan pilihan, agar Polri dapat kembali dilihat sebagai pelindung, pengayom, sekaligus mitra masyarakat dalam menciptakan keamanan bersama.

## **Perbandingan dengan Praktik di Negara Lain**

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa transformasi kepolisian sipil menuntut konsistensi

dalam membangun simbol, budaya, dan orientasi kerja. Di Inggris, misalnya, kepolisian yang dikenal dengan sebutan *policing by consent* menekankan kedekatan dengan masyarakat. Polisi di sana lebih banyak tampil tanpa senjata api dalam keseharian, seragamnya sederhana dan mudah dikenali, serta upacara resmi jarang menonjolkan peralatan tempur. Orientasi utamanya adalah kemitraan sosial, di mana legitimasi polisi berasal dari persetujuan dan kepercayaan masyarakat, bukan dari daya gentar senjata.

Begitu pula di negara-negara Skandinavia, seperti Norwegia atau Swedia, polisi sipil diposisikan sebagai bagian integral dari komunitas. Mereka lebih sering hadir dalam konteks pelayanan publik – misalnya dalam program pencegahan kriminal berbasis komunitas atau pelayanan sosial darurat – ketimbang dipamerkan dalam parade kekuatan. Seremonial mereka pun lebih sederhana, menekankan kedisiplinan dan keterbukaan ketimbang unjuk kekuatan paramiliter.

Di Jepang, kepolisian sipil berkembang dengan sangat khas melalui sistem *kōban* (pos polisi kecil di setiap lingkungan). Polisi Jepang umumnya tampil dengan senjata api ringan, namun yang lebih ditekankan adalah peran sosial mereka: membantu orang yang tersesat, menangani kecelakaan kecil, hingga menjembatani persoalan komunitas. Upacara kepolisian di Jepang pun jarang menonjolkan kendaraan tempur atau atraksi paramiliter; yang ditampilkan justru kedisiplinan, keteraturan, dan

integritas. Hasilnya, masyarakat Jepang melihat polisi bukan sebagai kekuatan yang menakutkan, melainkan sebagai bagian sehari-hari dari kehidupan sosial mereka. Tingkat kepercayaan publik terhadap polisi di Jepang pun konsisten tinggi.

Sebaliknya, di negara-negara yang masih mempertahankan atribut militeristik dalam kepolisian — seperti Filipina atau beberapa negara Amerika Latin — sering muncul ketegangan antara polisi dan masyarakat. Pola *show of force* dalam upacara atau operasi lapangan cenderung menciptakan citra represif, dan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. Hal ini menjadi cermin bahwa identitas sipil tidak dapat dibangun setengah hati: semakin kuat nuansa militeristik dipertahankan, semakin sulit pula polisi mendapatkan legitimasi sosial yang diperlukan untuk bekerja efektif.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Polri tidak berjalan sendirian dalam menghadapi dilema identitas. Ada contoh positif dari negara yang berhasil meneguhkan wajah sipil kepolisiannya, seperti Inggris, Skandinavia, dan Jepang; sekaligus contoh negatif dari negara yang gagal keluar dari bayang-bayang militerisme. Dari sini, penting bagi Polri untuk menegaskan pilihan: apakah ingin dikenal sebagai kekuatan sipil yang dipercaya rakyat, atau tetap terjebak dalam kesan kekuatan militeristik yang menjauhkan diri dari masyarakat.

## Jalan Menuju Identitas Sipil yang Kokoh

Meneguhkan identitas sipil Polri membutuhkan langkah yang lebih dari sekadar perubahan administratif atau slogan kelembagaan. Transformasi ini menuntut reposisi mendasar terhadap filosofi, orientasi, dan simbol-simbol yang selama ini melekat pada tubuh Polri. Titik awalnya adalah kembali ke ruh kepolisian sipil: *to serve and to protect*. Filosofi ini menegaskan bahwa kekuatan polisi bukanlah pada senjata, barisan, atau kendaraan taktis yang ditampilkan, melainkan pada kepercayaan masyarakat yang tumbuh melalui pelayanan dan perlindungan yang konsisten.

Orientasi pelayanan publik harus benar-benar menjadi wajah utama Polri dalam setiap momentum. Dalam acara seremonial, misalnya, yang ditonjolkan bukan lagi pameran alutsista atau atraksi paramiliter, melainkan inovasi pelayanan, capaian reformasi birokrasi, atau kisah inspiratif polisi yang bekerja senyap di akar rumput. Menata ulang budaya seremonial agar menonjolkan nilai pengabdian, bukan kekuatan, akan menghadirkan pesan yang kuat: Polri adalah sahabat, mitra, dan pelindung masyarakat, bukan bayangan yang menakutkan.

Transformasi identitas juga harus diwujudkan melalui reformasi simbolik. Atribut, lambang, dan seragam yang selama ini terkesan terlalu militeristik perlu dievaluasi dan diganti dengan simbol-simbol yang lebih humanis, sederhana, namun tetap berwibawa. Identitas visual semacam ini akan mem-



pertegas perbedaan Polri dengan militer sekaligus menegaskan orientasi sipil yang sejalan dengan demokrasi. Tidak kalah penting, revisi simbol juga merupakan bahasa komunikasi non-verbal kepada publik: bahwa Polri sedang menata ulang dirinya, mengedepankan keakraban dan pelayanan ketimbang intimidasi.

Selain itu, komunikasi publik Polri harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih humanis. Alih-alih sekadar menyampaikan data atau pernyataan resmi yang kaku, setiap pesan publik perlu dibingkai dengan empati, bahasa yang mudah dipahami, dan kesadaran bahwa masyarakat adalah mitra, bukan objek. Komunikasi humanis juga berarti keberanian mengakui kesalahan, menjelaskan langkah korektif, serta melibatkan publik dalam proses perbaikan. Dengan begitu, transparansi bukan hanya jargon, tetapi benar-benar menjadi pondasi kepercayaan yang kokoh.

Tidak kalah krusial adalah reorientasi pendidikan dan pelatihan internal Polri. Kurikulum kepolisian harus benar-benar dirombak untuk menanamkan kultur sipil. Penekanan bukan hanya pada keterampilan taktis bersenjata, melainkan pada keterampilan komunikasi, mediasi konflik, empati sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mengintegrasikan pendekatan sipil dalam pendidikan kepolisian adalah cara paling strategis untuk menyiapkan generasi baru polisi yang mampu hadir di tengah masyarakat tanpa kehilangan profesionalitas. Jika tidak ada pembenahan pada level

pendidikan, maka setiap slogan reformasi hanya akan berhenti di permukaan.

Agar tidak berhenti sebagai wacana, langkah-langkah ini perlu diterjemahkan dalam strategi implementasi konkret, antara lain:

Pertama, Reformasi Upacara HUT Bhayangkara – menampilkan testimoni masyarakat tentang pelayanan Polri, pameran inovasi teknologi pelayanan (seperti aplikasi digital pengaduan), serta penghargaan kepada anggota yang berprestasi di daerah terpencil, bukan parade alutsista.

Kedua, Revisi Seragam dan Atribut – desain seragam yang lebih sederhana namun elegan, mengurangi ornamen yang berkesan militeristik, serta menambah elemen simbolik pelayanan dan keterbukaan.

Ketiga, Program Komunikasi Publik Humanis – optimalisasi kanal digital resmi Polri dengan konten narasi humanis: kisah polisi membantu masyarakat, edukasi hukum dengan bahasa ringan, dan ruang interaktif tanya-jawab.

Keempat, Integrasi Kurikulum Empati dan HAM di SPN – membekali taruna dengan pelatihan simulasi interaksi sipil (role play), keterampilan de-eskalasi konflik, dan pembelajaran lintas perspektif bersama komunitas sipil.

Kelima, Evaluasi Berkala Budaya Organisasi – membentuk tim independen yang menilai apakah orientasi sipil benar-benar terinternalisasi dalam praktik sehari-hari anggota Polri, tidak hanya dalam dokumen resmi.

Transformasi ini memang tidak sederhana, karena menyentuh jantung budaya organisasi. Ia menuntut keberanian untuk meninggalkan warisan militeristik yang selama ini dijadikan sandaran legitimasi. Namun tanpa transformasi simbolik, kultural, dan filosofis, Polri akan terus dibayangi oleh stigma represif yang menggerus kepercayaan. Sebaliknya, dengan mengembalikan orientasi pada pelayanan dan perlindungan, Polri bukan hanya akan memenuhi tuntutan publik, tetapi juga mengokohkan diri sebagai institusi sipil modern yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi.

## **Penutup**

Reformasi Polri tidak dapat dipahami semata sebagai upaya meningkatkan kinerja operasional, seperti mempercepat layanan administrasi atau memperluas kemampuan digital. Lebih dari itu, reformasi menyentuh jantung persoalan identitas kelembagaan. Selama Polri masih terbelenggu oleh simbol-simbol dan budaya militeristik, wajah sipil yang menjadi ruh utamanya akan sulit terwujud. Padahal, kekuatan kepolisian modern bukanlah pada kekerasan yang ditampilkan, melainkan pada kepercayaan publik yang dibangun melalui pelayanan dan pengabdian yang konsisten.

Identitas sipil yang kuat akan memperkuat legitimasi Polri di mata rakyat. Masyarakat akan melihat polisi bukan sekadar sebagai aparat penegak hukum,

melainkan sebagai sahabat yang hadir di tengah kehidupan sehari-hari. Dari sinilah, slogan “Polri Presisi” menemukan maknanya yang sejati: prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang hadir nyata, bukan sekadar jargon.

Dengandemikian, transformasi identitas sipil bukan hanya soal citra, melainkan fondasi agar Polri mampu berjalan sejajar dengan nilai-nilai demokrasi. Sebuah kepolisian yang teguh dalam identitas sipilnya akan lebih dihormati, dipercaya, dan dicintai rakyatnya. Itulah marwah kepolisian yang sesungguhnya. []